

## Optimalisasi Potensi Ekonomi Syariah dalam Populasi Muslim Global untuk Mendukung Pencapaian SDGs: Studi Strategis tentang Zakat, Wakaf, dan Industri Halal

M. Fahmi Jauharudin R.S<sup>1</sup>, Khusnudin<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
240504310013@student.uin-malang.ac.id, khusnudin\_uin@yahoo.com

### ABSTRACT

*The global Muslim population, exceeding 1.9 billion, holds significant potential to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Through Islamic economic instruments such as zakat, waqf, and the development of the halal industry, substantial contributions can be made to poverty alleviation, improving education quality, and promoting sustainable consumption and production. This study identifies major challenges, including the lack of regulatory harmonization, low Islamic financial literacy, and limited international cooperation. On the other hand, substantial opportunities arise from technological innovation, global collaboration, and growing international interest in halal products. Strategies such as enhancing Islamic financial literacy, leveraging digital technology, and harmonizing policies across countries can optimize Islamic economics to support global sustainable development.*

**Keywords:** Islamic Economics, Zakat, Waqf, Halal Industry, SDGs, Islamic Financial Literacy,

### ABSTRAK

Populasi Muslim global yang mencapai lebih dari 1,9 miliar jiwa memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan pengembangan industri halal, kontribusi signifikan dapat diberikan dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan promosi konsumsi serta produksi berkelanjutan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama seperti kurangnya harmonisasi regulasi, rendahnya literasi ekonomi syariah, dan keterbatasan kerja sama internasional. Di sisi lain, peluang besar muncul melalui inovasi teknologi, kerja sama global, dan meningkatnya minat masyarakat internasional terhadap produk halal. Dengan strategi seperti peningkatan literasi ekonomi syariah, pemanfaatan teknologi digital, dan harmonisasi kebijakan antarnegara, ekonomi syariah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan secara global.

**Kata kunci:** Ekonomi Syariah, Zakat, Wakaf, Industri Halal, SDGs, Literasi Keuangan Syariah

### PENDAHULUAN

Pada tahun 2000 diluncurkan sebuah agenda global untuk mengurangi kemiskinan yaitu MDGs (Millennium Development Goals), dan sukses mengentaskan kemiskinan ekstrem, meningkatkan akses Pendidikan dan menurunkan angka kematian anak. Namun keberhasilan tersebut hanya melibatkan sebagian negara saja dan memiliki fkcus yang sempit. Sehingga dibentuklah agenda global lanjutan untuk

meneruskan MDGs yaitu SDGs Sustainable Development Goals pada tahun 2015 bertepatan dengan berakhirnya MDGs. (United Nation and Development, n.d.)

Berdasarkan keterbatasan itulah SDGs dirancang dengan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang. Selain itu SDGs juga mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Cakupan tersebut terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, melindungi lingkungan dan mendorong perdamaian, serta kemitraan global hingga tahun 2030.

Pencapaian SDGs menjadi krusial dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang terus berlanjut menghalangi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan fokus SDGs pada pengentasan kemiskinan (Goal 1), tercipta peluang untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi semua orang. Selain itu, ketimpangan sosial, baik dalam bentuk kesenjangan ekonomi, gender, maupun akses terhadap layanan esensial, menjadi ancaman besar bagi stabilitas sosial. SDGs menargetkan pengurangan ketimpangan (Goal 10) dan kesetaraan gender (Goal 5) untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, perubahan iklim terus menjadi tantangan serius dengan dampak seperti bencana alam, kelangkaan air, dan kerusakan ekosistem. SDGs melalui Goal 13 mendorong aksi nyata untuk mengatasi dampak perubahan iklim dengan pendekatan berkelanjutan. Pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan hanya akan membawa kerugian jangka panjang. Oleh karena itu, SDGs juga menekankan perlunya mengelola sumber daya secara berkelanjutan (Goal 12) untuk memastikan keberlangsungan generasi mendatang. Keseluruhan tujuan ini menunjukkan bahwa pencapaian SDGs bukan hanya upaya global yang mulia, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai permasalahan yang saling berkaitan di dunia saat ini. (United Nations (2015). The Sustainable Development Goals Report)

Pencapaian SDGs membutuhkan solusi kolektif dan pendekatan inovatif yang melibatkan seluruh sektor, termasuk kontribusi agama dan budaya sebagai elemen penting dalam keberhasilan agenda global ini. SDGs dirancang untuk menjawab tantangan kompleks yang membutuhkan kerja sama lintas sektor—dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga komunitas lokal. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga membutuhkan nilai-nilai yang mendorong perubahan perilaku, seperti keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap lingkungan. Peran agama dan budaya sangat strategis dalam membangun kesadaran kolektif dan mendukung transformasi sosial, terutama di negara-negara dengan populasi religius yang besar. Agama dan budaya dapat menjadi sumber inspirasi etika pembangunan, mendukung dialog antar komunitas, dan mempromosikan nilai keberlanjutan yang sejalan dengan tujuan SDGs. Dengan

demikian, keterlibatan berbagai pihak ini memastikan bahwa solusi yang diterapkan relevan secara lokal tetapi berdampak global.

Dalam konteks ini, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk mendukung pencapaian SDGs, terutama karena nilai-nilainya yang sejalan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Ekonomi syariah didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia (*falah*) melalui distribusi kekayaan yang adil, penghindaran praktik riba, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya dan penghapusan ketimpangan sosial. Sementara itu, keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan. Prinsip keberlanjutan menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan hak-hak generasi mendatang. Dengan nilai-nilai ini, ekonomi syariah dapat memberikan kerangka kerja alternatif yang mendukung solusi kolektif untuk tantangan global yang dihadapi dunia saat ini (Smolo et al. 2024).

Ekonomi syariah memiliki keselarasan yang kuat dengan tujuan-tujuan SDGs melalui penerapan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial yang menjadi inti dari sistem ini. Dalam hal keberlanjutan, ekonomi syariah mendorong pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, seperti dalam konsep *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), yang mendukung SDGs Goal 12 tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Prinsip ini tercermin dalam larangan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya dan dorongan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak merugikan lingkungan.

Sementara itu, dalam aspek keadilan sosial, ekonomi syariah memberikan perhatian khusus pada pemerataan distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini mendukung SDGs Goal 1 (pengentasan kemiskinan) dan Goal 10 (pengurangan ketimpangan). Pendekatan redistribusi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, menciptakan harmoni sosial, dan mendorong inklusi keuangan, terutama bagi kelompok rentan yang sering terpinggirkan dari sistem ekonomi konvensional.

Lebih jauh, larangan riba dalam ekonomi syariah mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan menghindari penindasan terhadap pihak yang lemah. Praktik ini sejalan dengan SDGs Goal 8 tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah tidak hanya menawarkan kerangka ekonomi alternatif tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya berbagai tujuan SDGs secara holistik.

Ekonomi syariah tidak hanya bersifat religius, tetapi juga memiliki relevansi global yang signifikan dalam menyelesaikan masalah sosial-ekonomi. Sistem ini

mengusung nilai-nilai universal seperti keadilan, keberlanjutan, inklusi, dan kesejahteraan bersama, yang relevan di tengah tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan. Melalui instrumen-instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf, ekonomi syariah mendorong redistribusi kekayaan yang efektif, memberdayakan kelompok rentan, dan mendukung inklusi keuangan, sehingga dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, larangan riba dan eksploitasi berlebihan menunjukkan komitmen sistem ini terhadap stabilitas ekonomi dan keberlanjutan, yang sangat relevan dalam konteks globalisasi. Dengan pendekatan etis dan keadilan sosialnya, ekonomi syariah dapat diterapkan secara luas, melampaui batas agama, sebagai kerangka alternatif untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh dunia (Kamali 2011).

Populasi Muslim global diperkirakan mencapai lebih dari 1,9 miliar orang, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. ("Negara Dengan Penduduk Mayoritas Muslim: Sebuah Tinjauan Global – Universitas Islam An Nur Lampung," n.d.). Secara geografis, komunitas Muslim tersebar luas, dengan konsentrasi signifikan di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, mencapai sekitar 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduknya ("Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)," n.d.).

Dalam konteks kontribusi ekonomi, komunitas Muslim global memainkan peran penting dalam berbagai sektor. Salah satu contohnya adalah industri keuangan syariah, yang terus berkembang pesat dan diperkirakan akan mencapai nilai US\$5,90 triliun pada tahun 2026. (OJK 2023). Selain itu, sektor pariwisata halal juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan pengeluaran wisatawan Muslim global diproyeksikan meningkat dari US\$58 miliar pada tahun 2021 menjadi US\$189 miliar pada tahun 2025. (Hasibuan et al. 2023). Kontribusi ini mencerminkan peran strategis komunitas Muslim dalam perekonomian global, baik melalui konsumsi maupun investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Potensi populasi Muslim global yang mencapai lebih dari 1,9 miliar jiwa memiliki relevansi besar dalam memobilisasi dana melalui instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan pengembangan industri halal. Dengan kewajiban zakat yang diatur dalam Islam, umat Muslim secara kolektif memiliki peluang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Menurut laporan Bank Dunia dan IDB (2020), potensi dana zakat global diperkirakan mencapai lebih dari USD 500 miliar per tahun, yang jika dikelola secara efektif dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi ketimpangan sosial.

Selain itu, wakaf sebagai aset produktif juga memiliki kapasitas untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang berkelanjutan. Banyak negara Muslim mulai mengembangkan model wakaf modern

dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi dana.

Dalam industri halal, populasi Muslim global yang terus bertumbuh menciptakan permintaan tinggi terhadap produk dan layanan halal, seperti makanan, minuman, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata. Sektor ini diproyeksikan memiliki nilai ekonomi global sebesar USD 2,3 triliun pada tahun 2025, menurut laporan Global Islamic Economy. Mobilisasi dana dari populasi ini tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan umat, tetapi juga memperkuat ekonomi global melalui prinsip-prinsip syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Populasi Muslim global yang mencapai hampir seperempat dari total penduduk dunia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu aktor utama dalam mendukung pencapaian SDGs jika dikelola secara strategis. Dengan jumlah yang signifikan dan konsentrasi yang tersebar di berbagai kawasan, umat Muslim dapat memainkan peran kunci dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, hingga pelestarian lingkungan. Dana yang dihimpun melalui instrumen-instrumen syariah seperti zakat dan wakaf dapat dialokasikan secara efektif untuk mendukung tujuan SDGs, seperti menyediakan akses pendidikan dan kesehatan (Goal 4 dan Goal 3), mengatasi kelaparan (Goal 2), dan meningkatkan kualitas infrastruktur (Goal 9).

Selain itu, industri halal yang tumbuh pesat juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi berkelanjutan, dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan mempromosikan konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab (Goal 8 dan Goal 12). Namun, agar potensi ini optimal, diperlukan manajemen strategis yang melibatkan kerjasama lintas sektor, integrasi teknologi digital, serta kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel. Dengan strategi ini, populasi Muslim dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun dunia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan visi SDGs.

Meskipun populasi Muslim global memiliki potensi besar untuk mendukung SDGs, berbagai tantangan masih perlu diatasi agar kontribusinya dapat optimal. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan umat Muslim, yang seringkali menghambat pemanfaatan instrumen seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah secara efektif. Selain itu, regulasi yang belum harmonis di berbagai negara juga menjadi kendala dalam mengintegrasikan sistem ekonomi syariah secara global. Teknologi, meskipun memberikan peluang besar, tetap menjadi tantangan dalam hal akses dan penerapannya, terutama di negara-negara berkembang dengan infrastruktur digital yang terbatas.

Namun, di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Perkembangan fintech syariah telah membuka jalan baru untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi dana sosial Islam, seperti zakat dan wakaf,

sekaligus memperluas akses keuangan syariah bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Integrasi ekonomi global juga membuka peluang bagi produk halal dan instrumen keuangan syariah untuk menjangkau pasar internasional yang lebih luas. Selain itu, meningkatnya kesadaran di kalangan umat Muslim tentang pentingnya ekonomi syariah sebagai solusi sosial-ekonomi memberikan momentum positif bagi pengembangan sistem ini. Dengan strategi yang tepat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi, dan peluang yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengeksplorasi strategi optimalisasi potensi ekonomi syariah dalam mendukung pencapaian SDGs. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pendekatan strategis yang dapat meningkatkan efektivitas instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan industri halal dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks penerapan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik yang aplikatif untuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi sosial Islam dalam mengelola sumber daya umat secara lebih strategis dan efisien. Misalnya, melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf, pengembangan regulasi yang mendukung integrasi global, serta kampanye edukasi literasi keuangan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat akademis, tetapi juga menjadi panduan implementatif bagi berbagai pemangku kepentingan dalam memaksimalkan kontribusi ekonomi syariah untuk mendukung pencapaian SDGs secara global.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Ekonomi Syariah diimplementasikan dengan beberapa prinsip yang telah disusun oleh para pakar, di antara prinsip ekonomi Syariah yaitu keadilan. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menekankan distribusi kekayaan yang adil. Melalui mekanisme seperti zakat dan wakaf, kekayaan dapat dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Larangan riba juga menjadi fondasi dalam menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi, menghindari eksploitasi pihak yang lemah.

Kemudian prinsip keseimbangan. Prinsip ini mengedepankan harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dalam ekonomi syariah, keseimbangan diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang tidak hanya mementingkan keuntungan materi tetapi juga dampak sosial yang positif.

Dalam hal keberlanjutan ekonomi syariah mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Konsep ini menghindari eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan dan mengupayakan kesejahteraan jangka panjang yang mencakup generasi mendatang.

Prinsip-prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid, ekonomi syariah dapat menjadi sistem yang mendukung keadilan sosial, keseimbangan, dan keberlanjutan.

Secara aplikatif ekonomi Syariah memiliki instrument untuk menjalankan sistemnya. Dintaranya yaitu zakat. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Dana zakat yang dikelola secara profesional dapat memberdayakan ekonomi masyarakat miskin melalui program pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro.

Selain zakat terdapat juga Wakaf. Wakaf produktif memiliki peran strategis dalam mendukung sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan memanfaatkan teknologi modern, wakaf dapat dikelola secara lebih transparan dan efisien untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Dalam perkembangannya, instrumen ekonomi Syariah tidak hanya berbicara zakat dan sedekah ataupun, namun juga Industri Halal. Industri halal mencakup berbagai sektor seperti makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik. Relevansinya terletak pada kemampuannya menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, mematuhi standar Islam, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian global.

Pada tahun 2015 PBB menggagas sebuah gerakan perkembangan berkelanjutan yaitu SDGs, dimana tujuan SDGs sendiri berkaitan dengan nilai islam. Tujuan pertama yaitu pengentasan Kemiskinan (SDG 1), hal ini selaras dengan Islam mendorong penghapusan kemiskinan melalui instrumen zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian ada tujuan dalam Pendidikan Berkualitas (SDG 4), pun sama halnya dengan Islam yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada kelayakan kerja dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8): Islam mendukung kegiatan ekonomi yang halal, beretika, dan memberikan manfaat sosial. Melalui nilai-nilai tersebut, ekonomi syariah dapat menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan pendekatan yang berbasis pada keadilan dan kesejahteraan.

Islam secara inheren mendorong keberlanjutan melalui konsep khalifah (manusia sebagai penjaga bumi) dan ta'awun (kerjasama untuk kebaikan). Konsep ini mendorong umat untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya. Maqashid syariah juga mendukung agenda keberlanjutan SDGs dengan menitikberatkan pada perlindungan aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat.

Populasi Muslim dunia mencapai lebih dari 1,9 miliar jiwa, tersebar di berbagai kawasan seperti Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, dan India memiliki jumlah populasi Muslim yang signifikan. Secara ekonomi, komunitas Muslim global memberikan kontribusi besar melalui permintaan terhadap produk halal dan layanan keuangan syariah, yang mencakup sektor makanan, minuman, farmasi, pariwisata, dan perbankan.

Sebagian besar populasi Muslim tinggal di wilayah-wilayah yang menjadi fokus SDGs, seperti Asia Selatan, Sub-Sahara Afrika, dan Timur Tengah. Populasi ini dapat berkontribusi dalam menyediakan tenaga kerja, menciptakan pasar baru, dan mendorong inovasi yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, industri halal yang berkembang dapat menjadi sarana untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai penelitian telah menunjukkan hubungan positif antara ekonomi syariah dan SDGs. Sebagai contoh, zakat telah terbukti efektif dalam mengentaskan kemiskinan di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Studi lain menunjukkan bahwa wakaf dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Diantara beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut.

Studi oleh Hudaefi (2024) menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung SDGs, khususnya melalui kebijakan pengawasan di Ciamis Regency, Jawa Barat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun kebijakan BUMD telah dirancang, integrasi eksplisit dengan indikator SDGs masih minim, sehingga memerlukan penguatan peran dewan pengawas dalam perencanaan dan pelaporan yang berorientasi pada SDGs.(Hudaefi 2024). Selain itu, penelitian oleh Singagerda dan Asmaria (2023) membahas peran zakat dan pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan inovasi berbasis SDGs.(Santi Singagerda and Asmaria 2023) Studi lain oleh Latifah (2022) juga memperkuat pentingnya integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keuangan tanpa spekulasi dan berbasis sosial, dalam mendukung tujuan SDGs di sektor pertanian, perdagangan, dan bisnis halal di Indonesia.(Latifah 2022) Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi syariah dan kebijakan lokal dapat menjadi alat strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif di Indonesia, meskipun masih diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aktor lokal dan kerangka kebijakan global.

Industri halal memiliki peran penting dalam menciptakan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa industri ini tidak hanya mematuhi standar etika Islam, tetapi juga mendukung keberlanjutan melalui efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Dengan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, industri halal menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung agenda SDGs.

Industri halal memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di era Society 5.0. Hikmatul Hasanah (2022) menyoroti pentingnya sinergi antara manusia dan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk industri halal, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan ekosistem. Industri halal memberikan pendekatan yang unik dengan mengintegrasikan prinsip syariat Islam, seperti konsep halal dan thayyib, untuk memastikan proses produksi yang beretika, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, laporan Global Islamic Economy juga menekankan peran strategis Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dalam pasar halal global, dengan potensi ekspor yang besar, meskipun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing di tingkat internasional (Hikmatul 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi syariah dalam mendukung pencapaian SDGs. Pendekatan ini berbasis studi pustaka (*library research*), yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data sekunder dari sumber-sumber yang relevan. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep, instrumen, dan strategi yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan SDGs. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran teoritis dan praktis tentang optimalisasi ekonomi syariah dalam konteks global.

Data primer diperoleh dari laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga internasional, seperti Islamic Development Bank (IsDB), United Nations Development Programme (UNDP), dan Global Islamic Economy Report. Selain itu, data dari lembaga zakat dan wakaf internasional, seperti World Zakat Forum, juga menjadi rujukan utama.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan ekonomi syariah dan SDGs, buku-buku tentang zakat, wakaf, dan industri halal, serta dokumen resmi seperti laporan Bank Dunia, IMF, dan OECD terkait pembangunan berkelanjutan. Data ini memberikan landasan teoritis dan statistik yang kuat untuk mendukung analisis penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan kajian literatur, penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber akademik dan laporan resmi yang relevan. Selain itu juga dilakukan pengolahan dan analisis data statistik atau temuan yang relevan dari berbagai sumber untuk memahami pola dan tren terkait kontribusi ekonomi syariah terhadap SDGs.

Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang dalam optimalisasi

ekonomi syariah terhadap SDGs. Proses analisis mencakup identifikasi tema utama, seperti peran zakat, wakaf, dan industri halal, kemudian pengelompokan data berdasarkan relevansi terhadap SDGs, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), dan kerja layak (SDG 8), dan kemudian dilakukan analisis hubungan antara potensi populasi Muslim global dan instrumen ekonomi syariah dengan tantangan SDGs.

Jika relevan, penelitian juga membandingkan kontribusi ekonomi syariah di negara-negara mayoritas Muslim dengan negara-negara minoritas Muslim untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam.

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan, yaitu terbatasnya akses ke data primer langsung dari lembaga-lembaga terkait, kemudian ketergantungan pada data sekunder yang dapat membatasi eksplorasi kondisi terkini di lapangan. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi signifikan melalui analisis teoritis dan strategis, terutama dalam memahami peran ekonomi syariah dalam mendukung SDGs secara global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Potensi Ekonomi Syariah dalam Populasi Muslim Global

#### 1. Analisis Populasi Muslim Global sebagai Penggerak SDGs

Populasi Muslim dunia diperkirakan mencapai 1,9 miliar jiwa pada 2024, dengan tingkat pertumbuhan yang konsisten lebih tinggi dibandingkan kelompok agama lainnya (Auxier and Anderson 2021). Sebagian besar populasi ini tersebar di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah, wilayah yang juga menjadi fokus utama agenda SDGs karena tantangan sosial-ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan populasi ini berkontribusi pada meningkatnya permintaan global terhadap produk halal, layanan keuangan syariah, dan filantropi Islam.

Populasi Muslim memainkan peran penting dalam mendorong pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (SDG 8). Misalnya, meningkatnya kesadaran umat Muslim terhadap pentingnya zakat dan wakaf telah menciptakan aliran dana filantropi yang signifikan untuk mendukung pembangunan masyarakat. Selain itu, industri halal global yang mencakup sektor makanan, fesyen, dan pariwisata telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara mayoritas Muslim.

#### 2. Peran Negara Mayoritas Muslim

Negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi memiliki kebijakan aktif dalam mempromosikan ekonomi syariah.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah menginisiasi strategi nasional keuangan syariah yang mencakup penguatan zakat, wakaf, dan pengembangan industri halal. Sedangkan Malaysia dikenal dengan regulasi dan infrastruktur yang mendukung sebagai pusat keuangan syariah global. Sementara itu, Arab Saudi berperan besar dalam pendanaan proyek-proyek pembangunan melalui lembaga seperti Islamic Development Bank (IsDB).

Inisiatif ini menunjukkan bagaimana negara-negara mayoritas Muslim dapat menjadi motor penggerak utama dalam memobilisasi dana zakat, wakaf, dan mendukung pertumbuhan industri halal. Kolaborasi antarnegara dan lembaga internasional, seperti World Zakat Forum, semakin memperkuat kontribusi mereka terhadap pencapaian SDGs.

## **B. Peran Zakat, Wakaf, dan Industri Halal**

### **1. Zakat: Kontribusi terhadap SDG 1 (Pengentasan Kemiskinan)**

Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk membantu kelompok miskin dan rentan. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil mengumpulkan dana zakat senilai triliunan rupiah setiap tahun, yang dialokasikan untuk program-program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan ekonomi dan bantuan pendidikan (BAZNAS 2023). Dengan adopsi teknologi seperti platform digital zakat, transparansi dan efisiensi pengumpulan zakat dapat ditingkatkan, sehingga memperluas jangkauan manfaatnya.

### **2. Wakaf: Mendukung SDG 3, SDG 4, dan SDG 9**

Wakaf telah digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas kesehatan (SDG 3), pendidikan (SDG 4), dan infrastruktur berkelanjutan (SDG 9). Misalnya, di Malaysia, wakaf produktif telah dikelola secara profesional untuk membangun rumah sakit dan universitas, memberikan dampak signifikan bagi masyarakat (Yaacob et al. 2022).

Wakaf produktif merupakan pengelolaan harta wakaf dengan cara menginvestasikannya dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan, di mana hasil tersebut digunakan untuk tujuan sosial sesuai dengan syariat Islam. Inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif sangat relevan dalam mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, terutama SDG 3 (Kesehatan), SDG 4 (Pendidikan), dan SDG 9 (Infrastruktur Berkelanjutan). Diantara inovasi wakaf produktif ialah wakaf tunai dan digital.

Wakaf tunai memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam wakaf tanpa harus memiliki aset fisik yang besar. Inovasi teknologi seperti aplikasi *crowdfunding* berbasis wakaf mempermudah pengumpulan dana secara luas dari berbagai kalangan masyarakat. Contohnya adalah platform

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan inisiatif lembaga filantropi seperti Dompot Dhuafa yang telah berhasil menggalang dana wakaf tunai untuk proyek-proyek produktif seperti pembangunan rumah sakit dan sekolah (“Leveraging Islamic Fintech to Improve Financial Inclusion,” n.d.),

Inovasi selanjutnya yaitu sertifikasi wakaf. Penggunaan blockchain dalam sertifikasi wakaf menjadi inovasi baru yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Teknologi ini memastikan bahwa pengelolaan wakaf bebas dari kecurangan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Contoh penerapan ini ditemukan pada beberapa proyek wakaf di Timur Tengah, yang mengintegrasikan blockchain untuk memantau alokasi dan distribusi hasil wakaf.

Inovasi lain adalah investasi hasil wakaf dalam sektor-sektor strategis, seperti properti komersial, perkebunan, atau usaha mikro yang berkelanjutan. Keuntungan yang dihasilkan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur (“Proyeksi Pengelolaan Wakaf Tahun 2023 - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id,” n.d.).

### **Pengelolaan Profesional Wakaf**

Pengelolaan wakaf membutuhkan tata kelola yang profesional dan transparan agar manfaatnya dapat dimaksimalkan. Beberapa langkah yang mendukung hal ini meliputi pendirian Badan Pengelola Profesional. Badan pengelola wakaf yang terorganisasi secara profesional, seperti Awqaf South Africa atau Badan Wakaf Indonesia (BWI), telah menunjukkan hasil signifikan dalam mengoptimalkan aset wakaf. Contohnya, BWI mengelola wakaf untuk mendirikan universitas, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya. (Kahf 2003)

Kolaborasi dengan sektor swasta juga memungkinkan pengembangan aset wakaf untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Misalnya, pengelolaan wakaf untuk proyek real estat yang keuntungannya dialokasikan pada program sosial. Tidak hanya itu pelatihan dan pendidikan untuk nazhir (pengelola wakaf) merupakan elemen penting dalam meningkatkan profesionalisme. Islamic Research and Training Institute (IRTI) dari Islamic Development Bank (IsDB) telah menawarkan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis para nazhir di berbagai negara. (“IRTI Selenggarakan Pelatihan Standar Syariah Untuk Lembaga Keuangan Islam | Regional Hub Indonesia | IsDB,” n.d.)

### **Dampak Wakaf Produktif pada SDGs**

Dampak yang pertama pada SDG 3 (Kesehatan), yaitu bahwa wakaf digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit wakaf, yang menyediakan layanan medis murah atau gratis kepada masyarakat kurang mampu. Contoh implementasi sukses adalah Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Banten yang

dikelola oleh BWI. ("Mengenal Lebih Dekat Rumah Sakit Mata Berbasis Wakaf Pertama Di Dunia - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id," n.d.)

Kemudian pada SDG 4 (Pendidikan), wakaf produktif membantu pendirian sekolah, universitas, atau pemberian beasiswa bagi pelajar yang membutuhkan. Universitas Al-Azhar di Mesir adalah salah satu contoh sukses penggunaan wakaf untuk mendukung pendidikan. Wakaf juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, seperti pembangunan sumur air bersih atau proyek energi terbarukan untuk masyarakat pedesaan.

Dengan demikian Inovasi dan pengelolaan profesional dalam wakaf produktif membuka peluang besar untuk mendukung agenda SDGs, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan adopsi teknologi modern dan tata kelola yang baik, potensi wakaf produktif dapat dioptimalkan untuk menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat global.

### **Industri Halal: Mendukung SDG 8 dan SDG 12**

Industri halal berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja (SDG 8) dan mempromosikan konsumsi serta produksi berkelanjutan (SDG 12). Pasar halal global diperkirakan bernilai USD 2,4 triliun pada 2023, mencakup sektor makanan, fashion, pariwisata, dan keuangan Syariah ("State of the Global Islamic Economy Report," n.d.). Penggunaan teknologi seperti blockchain dalam rantai pasokan halal membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen.

Industri halal telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di dunia, terutama dalam komunitas Muslim global. Dengan cakupan yang meliputi makanan, keuangan, pariwisata, fashion, dan kosmetik, industri ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan spiritual, tetapi juga memberikan dampak ekonomi signifikan. Berikut adalah peran penting industri halal dalam mendukung SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) dan SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*).

Industri halal berperan besar dalam menyediakan pekerjaan yang layak melalui pertumbuhan sektor-sektor berikut seperti Manufaktur dan Produksi Halal. Industri makanan dan minuman halal menjadi sektor utama yang menciptakan lapangan kerja, mulai dari petani, pekerja pabrik, hingga tenaga pemasaran. Misalnya, negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah memanfaatkan sertifikasi halal untuk meningkatkan ekspor produk makanan, yang secara langsung berdampak pada perluasan tenaga kerja di bidang ini.

Pariwisata halal yang ramah keluarga telah menciptakan banyak peluang kerja, mulai dari pemandu wisata, staf perhotelan, hingga pengembang paket wisata. Contohnya, Turki dan Uni Emirat Arab aktif mempromosikan pariwisata halal, yang tidak hanya menarik wisatawan Muslim, tetapi juga menciptakan pekerjaan di sektor pendukung seperti transportasi dan kuliner.

Kemudian dalam sector Keuangan Syariah, perkembangan keuangan syariah membuka lapangan kerja baru di bidang perbankan, investasi, dan asuransi berbasis syariah. Selain itu, fintech syariah memberikan peluang baru untuk inovasi dan wirausaha.

Selain itu ada sistem sertifikasi halal yang memastikan bahwa produk diproses dengan cara yang etis dan ramah lingkungan. Misalnya, penggunaan bahan baku yang sesuai dengan prinsip syariah sering kali mencakup praktik pertanian berkelanjutan dan pemrosesan yang meminimalkan limbah. Hal tersebut disertai dengan peningkatan kesadaran konsumen, Industri halal mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dengan mendorong transparansi dalam rantai pasokan. Konsumen Muslim yang sadar halal cenderung memilih produk yang tidak hanya halal, tetapi juga diproduksi secara etis dan berkelanjutan.

Penerapan teknologi seperti blockchain digunakan untuk memastikan transparansi dan efisiensi rantai pasokan halal. Hal ini tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Sehingga terbangun ekosistem industri halal yang ramah lingkungan. Beberapa negara seperti Malaysia telah mengintegrasikan prinsip halal dengan keberlanjutan. Contohnya adalah pengembangan Kawasan Industri Halal (*Halal Parks*), di mana proses produksi diarahkan untuk mengurangi dampak lingkungan dan memanfaatkan energi terbarukan.

Sebagai contoh yaitu Malaysia Halal Industry Master Plan. Malaysia telah menjadi pemimpin global dalam mempromosikan industri halal. Melalui Halal Industry Development Corporation (HDC), negara ini menciptakan kebijakan yang mendorong investasi, inovasi, dan pelatihan tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan sektor halal. Program ini menghasilkan lebih dari 300.000 lapangan kerja baru dalam dekade terakhir.

Di sisi lain, Industri Halal di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, mengembangkan ekosistem industri halal melalui sertifikasi produk, pendidikan halal, dan investasi dalam infrastruktur halal. Contoh nyata adalah pengembangan Kawasan Industri Halal di Jawa Barat yang diharapkan menciptakan ribuan pekerjaan baru.

### **C. Tantangan dan Peluang**

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya harmonisasi regulasi dan kebijakan antara negara-negara Muslim dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan standar halal. Perbedaan ini menyebabkan ketidakkonsistenan dan kompleksitas yang menghambat pertumbuhan ekonomi syariah secara global (Hamizar, Tubalawony, and Yaman 2024). Selain itu, literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih rendah. Banyak individu belum memahami konsep zakat, wakaf, dan industri halal secara mendalam, sehingga partisipasi dalam praktik ekonomi syariah belum optimal ("PT Eka Akar Jati," n.d.).

Keterbatasan kolaborasi internasional antara negara-negara Muslim dalam mempromosikan ekonomi syariah secara global juga menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya kerja sama ini mengakibatkan potensi ekonomi syariah belum termanfaatkan sepenuhnya di kancah internasional (Subandi 2023).

Di sisi lain, inovasi teknologi menawarkan peluang besar bagi optimalisasi ekonomi syariah. Pemanfaatan fintech syariah, blockchain, dan platform digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, serta memperluas aksesibilitas produk halal (“SKSG UI Selenggarakan Diskusi Publik ‘Digitalisasi: Peluang Dan Tantangan Keuangan Syariah’ – Sekolah Kajian Strategik Dan Global (SKSG) Universitas Indonesia,” n.d.).

Kerja sama internasional dengan organisasi global seperti UNDP juga membuka peluang untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kolaborasi semacam ini dapat memperkuat peran ekonomi syariah dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan pendidikan (“Bappenas: Optimalisasi Zakat Dan Wakaf Dukung Implementasi SDGs,” n.d.). Selain itu, meningkatnya minat masyarakat non-Muslim terhadap produk halal dan keuangan etis menunjukkan kesadaran global yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar industri halal dan layanan keuangan syariah (Hasyim 2023).

### **Strategi Optimalisasi**

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan, seperti edukasi dan literasi keuangan Syariah. Untuk mencapai hal tersebut dilaksanakan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, wakaf, dan produk halal. Selain itu, mengintegrasikan ekonomi syariah dengan SDGs dalam kurikulum pendidikan dapat membangun kesadaran sejak dini (Aunillah and Hidayah 2024).

Di zaman modern ini Inovasi Teknologi diperlukan. Inovasi teknologi mendorong penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Contohnya, aplikasi fintech syariah yang sukses memobilisasi dana filantropi Islam dapat dijadikan model (Agil, Kh, and Hasbullah 2023).

Kolaborasi Antar Lembaga pun diperlukan mengingat hal tersebut dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga syariah, dan organisasi internasional untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang mendukung SDGs. Pembentukan aliansi global untuk standardisasi dan promosi industri halal juga perlu dipertimbangkan (“Kementerian Komunikasi Dan Digital,” n.d.).

Lebih lanjut pengembangan kebijakan dan regulasi oleh dewan yudikatif dengan merekomendasikan kebijakan insentif untuk mendorong investasi dalam sektor zakat, wakaf, dan industri halal. Selain itu, harmonisasi regulasi antara negara-negara Muslim perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kontribusi ekonomi

syariah terhadap SDGs (Budianti 2022). Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan potensi ekonomi syariah dalam populasi Muslim global dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian SDGs secara efektif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Populasi Muslim global yang mencapai lebih dari 1,9 miliar jiwa memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melalui mobilisasi instrumen zakat, wakaf, dan pengembangan industri halal, komunitas Muslim dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan promosi konsumsi serta produksi berkelanjutan. Ekonomi syariah menawarkan solusi berbasis nilai keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan yang sejalan dengan agenda SDGs, seperti pengurangan ketimpangan (SDG 10), kerja layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab (SDG 12).

Instrumen zakat, wakaf, dan industri halal memiliki peran strategis. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mendukung pengentasan kemiskinan (SDG 1) melalui bantuan langsung kepada kelompok rentan. Wakaf, terutama dalam bentuk wakaf produktif, berkontribusi pada pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur berkelanjutan (SDG 3, 4, 9). Sementara itu, industri halal tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab, yang relevan dengan tujuan konsumsi dan produksi berkelanjutan (SDG 8, 12).

Namun, optimalisasi ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya harmonisasi regulasi antarnegara Muslim, yang menghambat efisiensi pengelolaan zakat, wakaf, dan standar halal. Selain itu, rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat menjadi kendala dalam partisipasi umat Muslim. Keterbatasan kerja sama internasional juga memperlambat upaya promosi ekonomi syariah secara global. Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti inovasi teknologi melalui penggunaan fintech syariah, blockchain, dan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana syariah. Meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNDP membuka peluang kolaborasi yang lebih luas untuk mendukung agenda SDGs. Dengan mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, ekonomi syariah dapat menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agil, M., Universitas Kh., & Wahab Hasbullah, A. (2023). Meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan: Strategi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. *03*, 156–175.
- Aunillah, R. G., & Hidayah, K. (2024). Strategi optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam mendorong pencapaian sustainable development goals pada LAZISMU DIY. *4*(1).
- Auxier, B., & Anderson, M. (2021). Social media use in 2021. *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021/>
- Bappenas: Optimalisasi zakat dan wakaf dukung implementasi SDGs. (n.d.). Diakses 19 Desember 2024, dari [https://kemenag.go.id/nasional/bappenas-optimalisasi-zakat-dan-wakaf-dukung-implementasi-sdgs-4glq46?utm\\_source=chatgpt.com](https://kemenag.go.id/nasional/bappenas-optimalisasi-zakat-dan-wakaf-dukung-implementasi-sdgs-4glq46?utm_source=chatgpt.com)
- BAZNAS. (2023). *Laporan pengelolaan zakat nasional*.
- Budianti, E. (2022). Tangan ekonomi syariah tahun 2024. *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 1–2. <https://pusaka.dpr.go.id>
- Hamizar, A., Tubalawony, J., & Yaman, A. (2024). Tantangan regulasi dan peluang manajemen keuangan syariah. *JICN (Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara)*, *1*(1), 50–62. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Hasanah, H. (2022). Industri halal sebagai sistem pendukung sustainable development goals di era Society 5.0. *Tabur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *4*(1), 43–59. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lantabur/article/view/4768/3392>
- Hasibuan, I. M., Mutthaqin, S., Erianto, R., & Harahap, I. (2023). Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *8*(2), 1200–1217.
- Hasyim, H. (2023). Peluang dan tantangan industri halal di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *7*(2), 665–688.
- Hudaefi, F. A. (2024). A text analytics study on the alignment of an Indonesian Muslim community's municipal corporation policy with sustainable development goals. *Public Administration and Policy*, *27*(3), 261–274. <https://doi.org/10.1108/PAP-10-2023-0132>
- IRTI selenggarakan pelatihan standar syariah untuk lembaga keuangan Islam | Regional Hub Indonesia | IsDB. (n.d.). Diakses 19 Desember 2024, dari <https://www.isdb.org/id/node/43825>

- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *The International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, 1–26. [http://monzer.kahf.com/papers/english/ROLE\\_OF\\_WAQF\\_IN\\_THE\\_WELFARE\\_OF\\_THE\\_UMMAH.pdf](http://monzer.kahf.com/papers/english/ROLE_OF_WAQF_IN_THE_WELFARE_OF_THE_UMMAH.pdf)
- Kamali, M. H. (2011). *Maqasid al-Shari'ah and sustainability science*. Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS).
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (n.d.). Diakses 19 Desember 2024, dari [https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/kemenperin-dukung-industri-halal-optimalikan-peluang-dan-jawab-tantangan-global?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/kemenperin-dukung-industri-halal-optimalikan-peluang-dan-jawab-tantangan-global?utm_source=chatgpt.com)
- Latifah, E. (2022). Peran ekonomi syariah dalam mendukung terwujudnya sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(3), 108–120. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i03.275>
- Leveraging Islamic fintech to improve financial inclusion. (n.d.). Diakses 19 Desember 2024, dari <https://www.worldbank.org/en/country/malaysia/publication/leveraging-islamic-fintech-to-improve-financial-inclusion>
- Mengenal lebih dekat rumah sakit mata berbasis wakaf pertama di dunia - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id. (n.d.). Diakses 19 Desember 2024, dari <https://www.bwi.go.id/4019/2019/11/18/mengenal-lebih-dekat-rumah-sakit-mata-berbasis-wakaf-pertama-di-dunia/>
- Menjadi Muslim, menjadi Indonesia (kilas balik Indonesia menjadi bangsa Muslim terbesar). (n.d.). Diakses 19 Desember 2024, dari <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Negara dengan penduduk mayoritas Muslim: Sebuah tinjauan global – Universitas Islam An Nur Lampung. (n.d.). Diakses 19 Desember 2024, dari [https://an-nur.ac.id/negara-berpenduduk-mayoritas-muslim/?utm\\_source=chatgpt.com](https://an-nur.ac.id/negara-berpenduduk-mayoritas-muslim/?utm_source=chatgpt.com)
- OJK. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Proyeksi pengelolaan wakaf tahun 2023 - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id. (n.d.). Diakses 19 Desember 2024, dari [https://www.bwi.go.id/8541/2022/12/23/proyeksi-pengelolaan-wakaf-tahun-2023/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bwi.go.id/8541/2022/12/23/proyeksi-pengelolaan-wakaf-tahun-2023/?utm_source=chatgpt.com)
- PT Eka Akar Jati. (n.d.). Diakses 19 Desember 2024, dari <https://ekaakarjati.id/article/detail/tantangan-dan-peluang-dalam->

keuangan-syariah?utm\_source=chatgpt.com

Santi Singagerda, F., & Asmaria, A. (2023). Peran zakat dan pembiayaan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 535–539. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8166>

SKSG UI selenggarakan diskusi publik ‘Digitalisasi: Peluang dan tantangan keuangan syariah’ – Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. (n.d.). Diakses 19 Desember 2024, dari [https://sksg.ui.ac.id/sksg-ui-selenggarakan-diskusi-publik-digitalisasi-peluang-dan-tantangan-keuangan-syariah/?utm\\_source=chatgpt.com](https://sksg.ui.ac.id/sksg-ui-selenggarakan-diskusi-publik-digitalisasi-peluang-dan-tantangan-keuangan-syariah/?utm_source=chatgpt.com)

Smolo, E., Saba, I., Ismail, N., & Mahomed, Z. (2024). Integrating Islamic finance into the sustainable development goals (SDGs). Dalam E. Smolo & M. M. Raheem (Eds.), *The Future of Islamic Finance* (hlm. 65–82). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83549-906-120241005>

State of the global Islamic economy report. (n.d.). Diakses 19 Desember 2024, dari <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>

Subandi, E. (2023). Tantangan dan peluang ekonomi syariah. <https://www.kompasiana.com/adintashafasalsabila4251/653f25ef110fce6fd57b2932/tantangan-dan-peluang-ekonomi-syariah>

United Nation, Department of Economic and Social Affairs, & Sustainable Development. (n.d.). *History*. <https://sdgs.un.org/goals>

Yaacob, W. N. W., Yaacob, L. H., Zulkifli, M. M., & Muhamad, R. (2022). A journey towards resilience: Coping strategies adopted by parents with children having autism spectrum disorder in Northeast Malaysia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4). <https://doi.org/10.3390/ijerph19042458>